



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(ILPPD)
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Bismillahi Rohmaanir Rohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2018 Walikota dan Wakil Walikota Pariaman kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Pariaman.

Penyampaian ILPPD Kota Pariaman Tahun 2018 ini dilaksanakan guna memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) pada hakikatnya merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

A. Gambaran Umum Kota Pariaman

Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $0^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar $73,36 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ km}^2$. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, dan Kecamatan Pariaman Utara. Kecamatan Pariaman Utara tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni $23,35 \text{ km}^2$, sedangkan Kecamatan Pariaman Tengah memiliki luas wilayah terkecil, yakni $15,68 \text{ km}^2$.

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2018 tercatat sebanyak 92.758 jiwa, yang terdiri dari 46.929 jiwa laki-laki dan 45.829 jiwa perempuan.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

VISI DAN MISI

Visi Kota Pariaman adalah ***“PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN BUDAYA EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA”***.

Pengertian dari Visi yaitu:

1. Kepariwisata adalah Suatu gerakan dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kota tujuan wisata adalah Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

3. Ekonomi kreatif adalah suatu gerakan pengembangan industri kerakyatan atau ekonomi kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu menjadi nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi kreasi daya cipta individu dan potensi daerah.
4. Berbasis lingkungan, budaya dan agama adalah dalam pelaksanaan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan menjadikan Pariaman Kota Hijau serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan.

Visi di atas akan diwujudkan dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi;
2. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri;
4. Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana.

C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp. 715.253.647.657,53 terealisasi Rp.634.781.641.164,23 atau 88,75%.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2018 dapat disampaikan secara ringkas sebagaimana pada uraian tabel berikut :

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Elemen Data		Capaian Kinerja
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak (2.896 org) ----- Jumlah anak usia 4-6 tahun (4.800 org)	x 100%	60,33%
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis (60.823 org) ----- Jumlah penduduk usia 15 th ke atas (61.030 org)	x 100%	99,66%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A (8.986 org) ----- Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (9.862 org)	x 100%	91,12%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B (4.576 org) ----- Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn (5.209 org)	x 100%	87,85%
2.	Kesehatan	Cakupan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (1.633 org) ----- Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (1.805 org)	x 100%	90,47%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 thn (393 org) ----- Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama (543 org)	x 100%	72,38%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn (84 org) ----- Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama (84 org)	x 100%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 (3.432 org)		22,55%



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

		pasien masyarakat miskin	----- Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota (15.219 org)	x 100%	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik dan sedang (185.560 km) ----- Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut (268.287 km)	x 100%	69,16%
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh (16,49 Ha) ----- Luas wilayah (7.336 Ha)	x 100%	0,22%
		Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni (21.693 rumah) ----- Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.(23.220 rumah)	x 100%	93,42%
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparaturnya Organisasi Kemasyarakatan 2. Fasilitasi OKP		2 kali
6.	Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan (5.464 org) ----- Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan(5.879 org)	x 100%	92,94%
7.	Tenaga Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (249 org) ----- Jumlah pencari kerja yang mendaftar (1.057 org)	x 100%	23,56%
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (17.388 org) ----- Jumlah angkatan kerja perempuan (31.650 org)	x 100%	54,94%
		Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf (31.405 org) ----- Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun (31.512 org)	x 100%	99,66%
9.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif (7.357 org) ----- Jumlah pasangan usia subur (11.221 org)	x 100%	65,48%



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

10.	Pangan	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (19.106,855 kg) ----- Jumlah penduduk (92.758 org)	x 1000	205,986
11.	Pertanahan	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah (355.810 m ²) ----- Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah (549.141 m ²)	x 100%	64,79%
12.	Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda (5 kasus) ----- Jumlah kasus lingkungan yang ada (7 kasus)	x 100%	71,43%
13.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP (60.982 org) ----- Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) (66.051 org)	x 100%	92,33%
14.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK aktif	Jumlah PKK aktif (76) ----- Jumlah PKK (76)	x 100%	100%
15.	Perhubungan	Angkutan Darat	Jumlah angkutan darat ----- Jumlah penumpang angkutan darat	x 100%	Normalisasi
16.	Komunikasi dan Informatika	Web site milik pemerintah daerah	www.pariamankota.go.id	Ada	Ada
17.	Koperasi dan UKM	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif (68 unit) ----- Jumlah seluruh koperasi (79 unit)	x 100%	86,08%
		Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro aktif (6.541 unit) ----- Jumlah usaha mikro (6.541 unit)	x 100%	100%
18.	Penanaman Modal	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2018 = Rp. 44.624.180.181 Realisasi PMDN thn 2017 = Rp. 53.759.622.670	x 100%	-16,99%
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga di Kota (50 lap) ----- Jumlah penduduk (92.758 org)	x 1000	0,54
20.	Statistik	Buku "Kota dalam angka" dan Buku "PDRB Kota"	Ada/tidak	Ada	Ada



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

21.	Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam 1 tahun	17 kali	17 kali
22.	Perpustakaan	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun (3.715 org) ----- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (77.929 org)	x 100%	4,77%
23.	Kearsipan	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku (12) ----- Jumlah SKPD (37)	x 100%	32,43%
24	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (6.327 ton) ----- x 100% Target Daerah (6.804 ton)	x 100%	92,99%
25	Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (52.584 ton) ----- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (6.204 ha)	x 100%	8,48%
26	Pariwisata	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	3.324.295 orang	3.324.295 orang
27.	Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (720.613,11) ----- Jumlah total PDRB (4.764.683,76)	x 100%	15,12%
28.	Perindustrian	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2018 = 1.722 Jumlah Industri tahun 2017 = 1.702	x 100%	1,18%
29.	Fungsi Penunjang	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	39 sistem	39 sistem
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada	Ada



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan untuk tahun anggaran 2018 ini dibagi menjadi tugas pembantuan yang diterima, yakni penugasan yang disertai dengan pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya tugas pembantuan yang diberikan, yakni penugasan yang disertai dengan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kota Pariaman.

1. Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari :
 - a. Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Koperasi dan UKM yang diperuntukan kepada Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM melalui program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro yang diperuntukan untuk Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) berupa Pujasera di Pantai Gandorih dan Depan Taman Anas Malik dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 448.749.599,- (90%) untuk 50 unit kios pujasera.
 - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan DIPA Nomor : SP. DIPA-018.08.4.089137/2018 tanggal 5 Desember 2017 kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pariaman dengan anggaran sebesar Rp.493.675.000,- dan realisasi sebesar Rp.489.630.000, - atau 99,13% yang diberikan dalam Program Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan 5 (lima) jenis kegiatan yakni :
 - Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian;
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

- Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

2. Tugas Pembantuan yang diberikan terdiri dari :

a. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa

Tugas pembantuan yang diberikan merupakan penugasan yang disertai dengan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kota Pariaman kepada seluruh desa yang ada di Kota Pariaman.

Adapun dana transfer yang dikelola oleh 55 desa yang ada di Kota Pariaman pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 91.486.234.841,05,- dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Pariaman sebesar Rp. 47.999.999.999,-
- Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.41.942.749.846,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kota Pariaman sebesar Rp. 1.543.484.996,05,-

Dari Anggaran pendapatan desa yang diterima tahun 2018 tersebut terealisasi oleh seluruh desa sebesar Rp. 90.863.642.852,- Atau sebesar 99,31% dan sisa anggaran tersebut menjadi SiLPA pada setiap APBDes di Desa dengan jumlah yang bervariasi dengan total sebesar Rp.9.022.966.875,55.

b. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kelurahan

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pariaman memberikan dana penunjang tugas pembantuan kepada lembaga kemasyarakatan Kelurahan seperti LPM, karang taruna, dan Rukun Tetangga (RT) berupa dana operasional serta dana pemberdayaan masyarakat yang dipergunakan sebagai pendukung/penunjang bagi masyarakat kelurahan untuk memberikan swadayanya dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum di lingkungan kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp. 745.600.000,- yang diperuntukan untuk kelurahan di wilayah Kota Pariaman.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Kerjasama Antar Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah kab/kota lainnya, antara lain :
 - a. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Nomor : 04/HUK-PJJ/2018, Nomor : 134.4/320/429.012/2018 Tentang Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja, Aplikasi UGDK (Unit Gawat Darurat Kemiskinan), Aplikasi EMS (Electronic Monitoring System) dan Aplikasi Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada tanggal 17 November 2018 yang bertempat di Banyuwangi.
 - b. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Nomor : 14/HUK-NK/2018, Nomor : 134.4/319/429.012/2018 Tentang Pengembangan Potensi Daerah pada tanggal 17 November 2018 yang bertempat di Banyuwangi.
 - c. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pembangunan Infrastruktur Skala Regional Dan Pembangunan Di Wilayah Perbatasan pada tanggal 15 Februari 2018 bertempat di Aula Balai kota Pariaman.
2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga ini dilakukan dengan Perguruan Tinggi yang berada di Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan di Bidang Pendidikan seluas-luasnya untuk seluruh Program Studi yang ada di Perguruan Tinggi tersebut, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Pariaman. Kerjasama dimaksud telah dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Politeknik ATI Padang Kementerian Perindustrian RI Nomor : 19/HUK-NK/2018, Nomor : 2035/SJ-IND.7.6/11/2018 tanggal 31 Desember 2018



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

- b. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Politeknik Negeri Padang Nomor : 05/HUK-NK/2018, Nomor : 5543/PL9/KS/2018 tanggal 6 September 2018.
3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
Serangkaian kegiatan yang dikoordinasikan dengan instansi vertikal di Kota Pariaman :
 - a. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pariaman.
 - b. Pensertifikatan asset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pariaman.
 - c. Penyusunan Buku Statistik Kota Pariaman, PDRB, dan Indikator Ekonomi yang dilaksanakan Bappeda berkoordinasi dengan BPS Kota Pariaman.
 - d. Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pariaman seperti Peringatan Tahun Baru Hijriyah, Penyelenggaraan Shalat Id pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Qurban, Pengelolaan BAZ, Pelaksanaan MTQ, dan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Pemerintah Kota Pariaman c/q Dinas Pendidikan juga melakukan koordinasi bersama dengan Kantor Departemen Agama.
 - e. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamongpraja Kota Pariaman berkoordinasi dengan Polresta Pariaman.
 - f. Pelaksanaan kegiatan kesadaran nasional yang dilaksanakan setiap bulannya dan Tim Ramadhan, pencapaian target Keluarga Berencana, penanggulangan penyandang masalah sosial, narkoba dan miras, berkoordinasi dengan Polresta, Komando Distrik Militer 0308, Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Kota Pariaman.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

4. Pembinaan Batas Wilayah, pada 2018 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun masih terdapat permasalahan antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman terhadap titik batas yang berada di Kecamatan Pariaman Utara yaitu titik batas di kawasan SUPM dan di Kecamatan Pariaman Selatan berada pada titik batas di kawasan Pasir Sunur.
5. Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Pariaman telah menekan MoU dengan BMKG Padang Panjang, dimana dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Pemerintah Kota Pariaman mempunyai komitmen yang tinggi dalam menyikapi potensi bencana yang ada, hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dibidang kebencanaan. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak resiko bencana di Kota Pariaman, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara BMKG Stasiun Padang Panjang dengan BPBD Kota Pariaman yang melingkupi tentang Pemanfaatan Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Cuaca Ekstrem, Iklim Ekstrem, Gelombang Laut Berbahaya, Hot Spot dan Kabut Asap untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Kota Pariaman. Disamping itu juga membahas Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah, dan Perbaharuan Dokumen Kajian Resiko Bencana.
6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030, yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2012, telah ditetapkan kawasan strategis Kota Pariaman sebagai berikut :

 - a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi adalah :
 1. Kawasan Naras Manggung sebagai Pusat Pengembangan Kegiatan Industri kecil/rumah tangga berupa Kain Bordir
 2. Kawasan Pasar Wisata sebagai Pusat Pengembangan Kegiatan Perdagangan Pariwisata



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

3. Kawasan Pantai Gandoriah – Sunur sebagai Pusat Kegiatan Wisata Kota Pariaman

4. Kawasan Strategis Jati sebagai Pusat kegiatan perdagangan & transportasi regional

b. Kawasan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan Wisata Budaya Tabuik di Pantai Gondaria-Sunur Kecamatan Pariaman Tengah.

c. Kawasan Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, adalah :

1. Kawasan Strategis Perlindungan Bahaya Bencana Alam (Kawasan sekitar Marunggi-Pariaman Selatan);

2. Kawasan Strategis Wisata dan Penangkaran Penyu Pantai Pauh;

3. Kawasan Strategis Pulau-Pulau Kecil.

7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kota Pariaman melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga penegak Perda dalam wilayah Kota Pariaman telah melaksanakan Perda meliputi:

a. Perda No. 32 Tahun 2004 tentang Izin Reklame;

b. Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam Kota Pariaman;

c. Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

d. Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);

e. Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

f. Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

g. Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Maksiat Kota Pariaman.

h. Perda Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

8. Hal lain-lain

Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. Penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat Kepatuhan Tinggi 2018 Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- d. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN
- e. Penghargaan Juara I Pemuda Pelopor Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Dan Pariwisata Tingkat Nasional diberikan kepada INDRA MUCHLISIN dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
- f. Penghargaan kepada Roni Efendi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Utusan Provinsi Sumbar Sebagai Peserta Seleksi Dan Orientasi Tagana Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018 dari Kementerian Sosial RI
- g. Penghargaan Peringkat II Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018 diberikan Kepada Harfita Sari (PSM Kel. Batang Kabung, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman Prov Sumbar) dari Kementerian Sosial RI
- h. Sertifikat ISO 9001:2005 dari Transpacific Certification Limited (TCL) kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

Demikianlah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kota Pariaman yang meliputi aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai Kepala Daerah.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pariaman sehingga dapat berjalan secara baik dan kondusif.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pariaman untuk tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam membangun Kota Pariaman.

Amiin ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

WALIKOTA PARIAMAN

Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si